

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latarbelakang Masalah**

Pasca reformasi tahun 1998, Partai Politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Misalnya dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik, hasil Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 yang lalu, mengamanatkan bahwa setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam Pemerintahan (eksekutif), Perwakilan (legislatif), dan Peradilan (yudikatif) baik di tingkat Pusat maupun Daerah, mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam kepentingan pemilu yang melalui mekanisme politik secara demokratis.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Sehingga, salah satu institusi dari pelaksanaan demokrasi modern, menginginkan sebuah sistem dimana yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga-lembaga formal seperti parlemen maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Maka partai

politik merupakan salah satu sarana untuk menjadikan keterwakilan atas dari masyarakat yang menampung atas masing-masing aspirasi.

Dalam literatur-literatur ilmu politik dijelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi seperti: *fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik* dan *fungsi komunikasi politik*. Seperti fungsi rekrutmen politik sebagai salah satu fungsi dari partai politik yang merupakan fungsi yang sangat penting. Fungsi rekrutmen berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.

Menurut *Budiardjo* (2008: 405) partai politik memiliki beberapa fungsi seperti: (1) sarana komunikasi politik; (2) sarana sosialisasi politik; (3) sarana rekrutmen politik; dan (4) sarana pengatur konflik. Dalam melakukan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, mayoritas partai politik hanya melakukan proses perekrutan pada saat mendekati pemilihan saja. Sehingga, hal ini menyebabkan timbulnya kader-kader instan yang tidak kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya, ketika kader tersebut menduduki jabatan-jabatan politik. Idealnya sebuah partai politik dalam melakukan perekrutan terhadap anggota, hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilihan. Hal ini akan memberikan waktu kepada partai politik untuk melatih kader-kader partainya dengan baik sehingga kader-kader yang mengikuti proses kaderisasi tersebut akan menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program kerja partai.

Selain permasalahan tersebut, saat ini partai politik juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan menyangkut tentang masalah rekrutmen itu

sendiri. Salah satu permasalahan lama yang timbul ialah politisi-politisi yang sering berpindah-pindah partai, atau publik sering menyebutnya sebagai politisi oportunistis “*kutu loncat*” maupun munculnya gejolak internal partai pada setiap pimpinan partai. Kemudian, juga munculnya politisi yang terjebak pada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Fenomena tersebut, menunjukkan bahwa masih lemahnya proses rekrutmen kandidat politik di internal partai. Lemahnya rekrutmen politik di partai politik merupakan sebuah persoalan yang penting pada hari ini, sehingga partai politik perlu melatih calon-calon pemimpinnya, baik lokal maupun nasional yang memiliki mental yang jujur, bersih serta punya visi dan misi yang jelas. Terutama untuk bersaing pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 nanti.

Seperti yang diungkapkan oleh *Mas’oed*, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. (*Mas’oed* dalam Tangkilisan, 2003:188). Peran dan fungsi partai politik tersebut juga secara detail dijelaskan oleh *Surbakti*, Bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah ikut serta dalam pemilihan umum. *Ramlan Surbakti* (1992:189).

Lanjutnya, ketika melaksanakan fungsi itu, partai politik dalam sistem politik demokrasi harus melaksanakan tiga kegiatan, yaitu meliputi *seleksi calon-*

*calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan* (legislatif/ yudikatif). Sehingga, apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik.

Partai politik yang menjadi unggulan dan sorotan publik saat ini. Salah satunya ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai ini menunjukkan identitas dan eksistensinya melalui faktor penokohan Jokowi, yang telah memenangkan dalam percaturan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Sebagai partai ideologis yang berbasaskan Pancasila, PDIP mempunyai tujuan untuk berperan aktif dalam usaha-usaha mencapai cita-cita bersama. Sehingga, PDIP berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa.

Sebagaimana data yang di dapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), terkait data penetapan caleg terpilih DPRD kabupaten Musi Rawas (Mura) pada periode 2014-2019 lalu. KPU Sumsel menetapkan 45 perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 yang lalu. Rapat pleno terbuka itu dipimpin langsung ketua KPU Sumsel, Aspahani dan 4 komisioner KPU Sumsel, Bawaslu Sumsel, serta dihadiri 12 Parpol peserta pemilu.

Hasil pleno KPU Kabupaten Musi Rawas, PDIP memenangkan Pemilu Legislatif 2014 untuk DPRD Kabupaten dengan perolehan suara 41.464 suara. Disusul ditempat kedua adalah PAN 38.210 suara, kemudian Partai Golkar 36.806 suara, sedangkan pendatang baru yaitu Partai Nasdem berada di posisi keempat dengan 31.606 suara. Kemudian, untuk perolehan jumlah kursi DPRD Kabupaten

Musi Rawas 2014-2019, keempat partai teratas ini sama-sama memperoleh jumlah kursi tertinggi yakni 6 kursi dari total 45 kursi yang diperebutkan.

Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Hasil Perolehan Kursi setiap Partai di DPRD Kabupaten Musi Rawas**

No	Partai	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1	PDIP	6 Kursi	30.619
2	PAN	6 Kursi	25.090
3	Golkar	6 Kursi	26.546
4	Nasdem	6 Kursi	22.253
5	Gerindra	5 Kursi	21.536
6	Hanura	5 Kursi	20.339
7	PKS	4 Kursi	18.224
8	Demokrat	4 Kursi	22.858
9	PBB	2 Kursi	13.410
10	PKB	1 Kursi	4.967
11	PPP dan PKPI	0 Kursi	9.068 dan 5.833
<b>Total Kursi di DPRD Kab Musi Rawas</b>		<b>45 Kursi</b>	

*Sumber : KPU Kabupaten Musi Rawas tahun 2014.*

Berdasarkan data yang dikemukakan diatas, hanya ada dua belas orang wajah lama (Petahana) yang masih bertahan dari 45 kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas dan sisanya dikuasai oleh Wajah-Wajah baru. Berarti hanya sekitar seperempat anggota DPRD periode 2009-2014 yang mampu bertahan di periode berikutnya.

Kedua belas Wajah Lama anggota DPRD periode 2009-2014 tersebut adalah Azandri, Aliudin, Sri Wahyuni (PDIP). Sedangkan dari partai PAN adalah HA Firdaus, Toyeb Rakembang serta I Wayan Kocap. Hanura diwakili Marwan Chandra, Ngadi dan A. Bastrari Ibrahim. Sisanya yang kembali duduk adalah Alamsah (Demokrat), Wahisun Wais Wahid (PBB) dan HM Asir (PKS),

walaupun sampai saat ini ada kemungkinan sistem Pergantian Antar Waktu (PAW) diterapkan.

Selain pengurus yang disebutkan diatas, untuk pengurus dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Musi Rawas berjumlah 15 orang. PDIP yang mendapatkan 6 kursi pada saat Pileg tahun 2014 di Kabupaten Musi Rawas kemarin, dan menjadi partai pemenang di Kabupaten Musi Rawas, secara otomatis telah mengantarkan kader terbaik duduk menjadi ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas. Menariknya, pada mekanisme pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas kemarin. Terpilihnya sosok figur muda di kalangan internal partai di daerah dan mengalahkan beberapa kontestan atau kandidat partai lainnya. Yakni, “*Yudi Fratama, SH*” yang memiliki jumlah suara yang lebih kurang sekitar 2000 suara. Suara yang cukup fantastis untuk seorang yang baru dalam pertarungan Pileg. Di isukan bahwa, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas yang di usung dari PDIP ini maju atas rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai.

Informasi yang peneliti dapatkan langsung pada yang bersangkutan, untuk mekanisme Ketua DPRD memang tidak menggunakan suara terbanyak, akan tetapi di dalamnya harus melalui proses *Tes* dan *Seleksi*, namun rekomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai menjadi nilai jual dalam kursi untuk seorang Ketua DPRD. Disadari bersama, bahwa biasanya diutamakan ketua partai terlebih dahulu, sebagaimana beberapa periode Pilpres yang lalu. Penokohan dari “Megawati” sangat mendominasi untuk mewakili partai dalam pertarungan

Pilpres 2009 kebelakang kemarin. Berbeda kasus jika melihat penokohan “Jokowi”, yang menurut peneliti ada perubahan dalam strategi partai.

Kemudian kembali pada informasi kasus, jika pada saat pencalonan ketua partai tidak dapat duduk di DPRD, barulah dilihat siapa pengurus DPC yang dapat dan berhak untuk duduk di DPRD. Jika ada, maka direkomendasikan tiga(3) orang untuk ikut *tes* dan *seleksi* internal partai. Setelah proses *tes* dan *seleksi*, maka kandidat tersebut tinggal menunggu hasil keputusan dari DPP. Sedangkan, pada tahun 2014, Yudi Fratama, SH belum menjabat sebagai ketua Partai PDIP. Namun keputusan DPP berpihak kepada beliau untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas. Ditambah lagi, melihat kondisi politik hari ini, penentuan dalam seleksi kandidat politik pada Pileg 2019 nanti, akan menjadi pekerjaan rumah di internal partai, khususnya DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas.

Partai PDI-P menerapkan demokrasi internal partai. Penerapannya dilakukan terlihat dari proses MUNAS yang dilakukan. MUNAS dilakukan memang bertujuan pada pemilihan sosok Ketua Umum Partai. Dimana hal ini selalu menjadi perebutan kekuasaan di internal partai itu sendiri. Kader satu sama lainnya tidak terlepas dari gejolak politik dan pembentukan rezim muda dan tua. Seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru, yang ditandai dengan pengunduran diri oleh Soeharto pada 11 Maret 1998. Dampaknya adalah muncul rezim muda (akbar tanjung, jusuf kalla, dan aburizal bakrie) yang menyelamatkan organisasi. Perubahan dimulai dari menentukan sikap dan merombak struktur organisasi.

Permasalahan pada sistem demokrasi pada internal partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas adalah, mengapa demikian mudahnya seorang legislatif

yang terpilih dengan suara mayoritas dan dengan profil muda, namun dapat merebut kursi menjadi ketua umum partai. Seperti apa dalam sifat proses rekrutmen politik yang dilakukan pada internal partai tersebut. Menarik untuk peneliti angkat kasus ini dengan asumsi bahwa, pembaharuan dalam tema rekrutmen politik yang berfokus pada pendekatan-pendekatan teori demokrasi internal partai.

Oleh karena itu, melihat proses rekrutmen caleg PDI-Perjuangan di Kabupaten Musi Rawas kemarin, terlihat jelas bahwa masih ada beberapa yang menjadi kelemahan-kelemahannya, diantaranya ialah proses rekrutmen kandidat politik (caleg) yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan partai dan masih tertutupnya proses rekrutmen yang dilakukan. Adapun yang menjadi keunggulan proses rekrutmen caleg, PDI-Perjuangan dalam merekrut kandidat politik, seharusnya lebih memprioritaskan kader internalnya yang lebih berkualitas dan berpengalaman ketimbang mencoba merekrut caleg baru, hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas dan pengalaman yang dimiliki caleg. Sehingga, permasalahan seperti ini lebih dikenal dengan demokratisasi internal partai.

Oleh karena itu, melihat permasalahan tersebut, penelitian ini akan menjadi menarik dan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pada tema rekrutmen politik dan demokrasi internal partai, sehingga, peneliti mengusung tema ***“Analisis Rekrutmen Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Internal Partai” Studi Kasus: DPC PDP-P Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.***

## **1.2. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, maka dirumuskan masalah penelitiannya adalah:

- Bagaimana Proses Rekrutmen Politik di DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan demokrasi internal partai?.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengidentifikasi proses rekrutmen politik dalam mewujudkan demokrasi internal partai, yakni DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

Sedangkan untuk Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu politik, khususnya mengenai ilmu pemerintahan yang berkenaan dengan rekrutmen politik pada partai politik.
2. Secara praktis, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berfikir dan mengasah kemampuan dalam membuat karya ilmiah. Kemudian diharapkan dapat memberikan masukan pada peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat lebih jauh mengenai rekrutmen politik.